**IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGANGGARAN PROGRAM E-KTP DI KECAMATAN
TAMBUSAI DAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2011-2012**

ridho_rezeky@yahoo.com/081277955356

Oleh: **Rezeki Ridho** atas bimbingan **Erman Muhtar**.

ABSTRACT

Sustenance REZEKI RIDHO (0901133225) , " Policy Implications of e - ID card Budgeting in District Tambusai and North Tambusai Rokan Hulu in 2011-2012". This research is motivated by the existence of programs designed by the Central Government through the Minister of the Interior of the national ID card in order to make the data population in Indonesia is not a double . Related to this would be the main implementers of Local Government . Similarly circuitry Rokan Hulu . The program began in 2011, but can only be effectively implemented in mid-2012 . It is the target of becoming the fastest districts in the implementation of the national e - ID card . It turned out that the plan is achieved , but it turned out to be the result of the implementation of e-ID in Rokan Hulu itself varies . Of the 16 districts are the two districts with the lowest implementation , namely Kacamatan Tambusai and North Tambusai . Allegedly this is caused by the implementation of the policy system operasipnal incorrect e - ID card , which is set equal anggaranyang for all districts , whereas these two densely populated districts would require more budget too much . In this regard certainly drawn up plans to be realized . However , what has been planned that the results have not been able to reach the target . Where these two districts until today have to process people who have not made the recording , resulting in the delivery of data center becomes slow.

The results of this study indicate that : 1) the implementation of e-ID in the District of North Tambusai Tambusai and relatively slow . 2) budgeting system which does not consider the real conditions in the field to be one of the obstacles that have implications for other aspects . 3) the lack of public awareness of the importance of the e - ID card program . 4) the availability of facilities such as electrical and instrument recording is limited to one of the barriers to the implementation of e - ID card recording in District Tambusai and especially North Tambusai

Keyword : *policy , budget implications , Performance Monitoring , and Corection Action.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

KTP elektronik yang merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri tentu akan menjadi program tingkat daerah demikian juga bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Pelaksanaan e-KTP di Rokan Hulu pada November 2012 lalu mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai Kabupaten tercepat dalam proses perekaman e-KTP dari target nasional.

Di Rokan Hulu sendiri terdapat adanya 16 Kecamatan, namun dalam pelaksanaan e-KTP sendiri masih bervariasi hasilnya yakni adanya Kecamatan dengan hasil pelaksanaan tertinggi dan hasil pelaksanaan terendah. Padahal, setiap Kecamatan dalam pelaksanaan e-KTP di Rokan Hulu mendapat instruksi yang sama dari bupati serta dengan jumlah petugas dari Disdukcapil yang sama jumlahnya dan dibantu oleh aparat kecamatan yang bersangkutan. Dalam hal ini terdapat adanya dua Kecamatan dengan hasil terendah yakni Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara. Adanya persentase terendah dalam pelaksanaan perekaman e-KTP di dua Kecamatan ini disebabkan oleh adanya banyaknya penduduk dengan sedikit partisipasi dalam pelaksanaan program ini. Kemudian, di dua Kecamatan ini ada banyak terdapat daerah-daerah atau desa-desa terpencil yang jauh dari wilayah pusat kecamatan, sehingga ini menjadi salah satu factor masyarakat malas melakukan perekaman.

Keterangan yang penulis dapat sementara dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hasil interview dengan petugas UPTD lapangan untuk kekurangan jumlah penduduk yang saat ini belum melakukan e-KTP akan segera digesa untuk melakukan perekaman, sedangkan sebagian lainnya belum mendapat e-KTP bukan karena belum melakukan perekaman akan tetapi data-datannya belum dikirim ke pusat.

Selanjutnya factor lain yang ikut mempengaruhi pelaksanaan perekaman e-KTP di dua kecamatan ini adalah adanya penetapan system anggaran yang sama untuk semua kecamatan yang ada Di Rokan Hulu menimbulkan implikasi ekonomi bagi pelaksanaan program e-KTP di daerah. Implikasinya dapat dilihat dari permasalahan adanya keterlambatan perekaman e-KTP di beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara ini. Penganggaran yang sama berimplikasi pada pelaksanaan program di daerah. Jumlah penduduk yang banyak di dua Kecamatan ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menganggarkan dana operasional e-KTP.

1.2 Tinjauan Pustaka

Kebijakan menurut **Carl Friedrich (Solichin, 2004: 3)**, adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Suparmoko (2004: 33) anggaran adalah suatu daftar atau pertanyaan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran Negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun. **Syamsi (1986:33)** anggaran adalah hasil perencanaan yang berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan secara terpadu yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Sri Mastuti dan Dian Kartika Sari 2001:4, anggaran merupakan titik masuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Anggaran juga merupakan saran bagi masyarakat untuk melakukan control terhadap pemerintah dan untuk menjamin bahwa kepentingan dan kebutuhannya dipenuhi atau diperhatikan. Anggaran merupakan satu tolok ukur untuk melihat apakah seluruh pemerintahan benar-benar bekerja mensejahterakan rakyat atau mensejahterakan dirinya sendiri.

Baswir (1998; 26) mengemukakan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan suatu struktur dan klasifikasi tertentu adalah suatu langkah penting untuk mendapatkan system penganggaran yang baik dan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola Negara. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah. Penyusunan anggaran tidak bisa dilepaskan dari karakteristik suatu daerah, untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian anggaran

Menurut (I Made Leo Wiratma, M. Djidjono, dan TA. Legowo, 2007:289) Penyusunan dan Penetapan Anggaran memiliki arti penting dan strategis karena mengandung tiga fungsi utama dalam rangka terciptanya kesejahteraan masyarakat, yaitu, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan stabilisasi.

1. Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa kegiatan penyusunan anggaran merupakan sarana untuk penyediaan dan jasa sosial yang dibutuhkan masyarakat (publik).
2. Fungsi Distribusi yaitu penyusunan anggaran yang merupakan mekanisme pembagian secara merata dan berkeadilan atas berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat dan pemanfaatannya.
3. Fungsi Stabilisasi yaitu adanya mekanisme kebijakan fiskal seperti pajak, cukai, retribusi dan pengeluaran (belanja sektor pemerintah maupun swasta/masyarakat) akan mempengaruhi pemerintaan agregat dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Menurut **Bohari (1995)**, menyatakan bahwa terdapat beberapa asas dalam penyusunan anggaran modern untuk sebuah kebijakan, yaitu:

1. Asas kelengkapan
Semua pengeluaran dan penerimaan secara tegas dimuat dalam anggaran. Tidak boleh ada penerimaan atau pengeluaran yang tidak dimasukkan ke dalam kas Negara.
2. Asas spesialisasi/ spesifikasi
Susunan anggaran terdiri dari berbagai macam pengeluaran dan penerimaan, sehingga perlu diadakan klasifikasi tertentu. Berbagai jenis kemungkinan klasifikasi ditentukan berdasarkan tujuan Negara.
3. Asas berkala
Anggaran yang ditetapkan memiliki jangka waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Asas ini juga berkaitan dengan system pengawasan dalam pelaksanaannya.
4. Asas formil
Adanya keharusan setiap anggaran memerlukan bentuk tertentu yang mengikat semua pihak. Dalam hal ini berbentuk Undang-undang.
5. Asas publisitas
Merupakan asas dalam demokrasi bahwa tidak ada urusan public tidak ada yang bersifat rahasia

Secara umum anggaran memiliki tiga fungsi dalam perencanaan dan pelaksanaannya, yaitu:

a. Fungsi politik

Adanya kesempatan kekuatan-kekuatan politik didalam (DPR) yang ikut menyusun/ memilih keinginan mereka, serta memberi kuasa pada pemerintah untuk melaksanakannya

b. Fungsi yuridis

Dokumen yang berbentuk Undang-undang yang mengikat khususnya pemerintah yang berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan Negara. Fungsi yuridis merupakan sarana yang membatasi pemerintah dalam hal pengeluaran yang melampaui batas-batas anggaran.

c. Fungsi ekonomi

Bahwa anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan pembangunan.

1. Implikasi Anggaran

Berbicara mengenai masalah pemerintah sebagai institusi maka tidak terlepas dari yang namanya kebijakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Jika suatu kebijakan di buat dan dilaksanakan tanpa disertai dengan system penganggaran yang adil, akuntabel dan transparan, maka akan berimplikasi pada realisasi penganggaran dalam kebijakan itu sendiri.

1.3 Permasalahan

Pelaksanaan program e-KTP di Kabupaten Rokan Hulu yang menunjukkan hasil yang bervariasi, sehingga menimbulkan permasalahan yang menarik untuk diteliti. Dalam permasalahan tersebut, dari 16 jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dan pelaksanaan perekaman e-KTP di gelar secara serentak terdapat dua kecamatan yang pelaksanaannya menunjukkan angka yang rendah. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara. Sementara, untuk kecamatan lainnya telah terlaksana sesuai standar. Permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan hal ini disebabkan oleh adanya system anggaran operasional yang tidak ditetapkan sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah masing-masing kecamatan. Dimana, system penganggaran yang ditetapkan sama meskipun jumlah penduduk di masing-masing kecamatan berbeda. Sedangkan secara fakta wilayah yang penduduknya banyak akan membutuhkan anggaran yang berbeda dengan wilayah yang penduduknya sedikit dan menengah. Hal inilah yang mempengaruhi terlaksananya perekaman e-KTP di dua kecamatan ini.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara serta untuk mengetahui hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara sehingga menimbulkan implikasi pada kebijakan e-KTP di daerah.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terdapat dalam proses pelaksanaan perekaman e-KTP di Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis *snowball sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara berantai, teknik penentuan sampel mulanya kecil atau satu orang informan (*key informan*) saja kemudian menjadi banyak.

1. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara, yaitu merupakan proses tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Fokus yang diwawancarai adalah masalah pelaksanaan dan hambatan yang terjadi.
- b. Penelusuran dokumen,
- c. Pengamatan

2. Teknik analisa data

- a. Reduksi, yaitu dimulai dari kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber di lapangan untuk kemudian diolah menjadi bahan dalam pemaparan/deskripsi permasalahan yang diteliti.
- b. Deskripsi/penyajian data, yaitu pemaparan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang berupa masalah, fenomena dan data konkrit.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu penarikan suatu sudut pandang secara umum berdasarkan permasalahan yang telah disajikan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan e-KTP Secara Keseluruhan

Pemerintah menerapkan E-Government yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsive, efektif dan efisien. E Government memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk peningkatan daya saing dengan Negara-negara lain. Seperti yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik. E-Government menerapkan system pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik. Berdasarkan pemaparan tersebut, salah satu penerapan implementasi e-Government dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah E-KTP (elektronik kartu tanda penduduk). Indonesia dengan jumlah penduduknya yang besar memerlukan data kependudukan yang akurat, untuk itu pemerintah membuat program yang disebut dengan E-KTP. E-KTP merupakan cara baru jitu yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan system biometric yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik E-KTP dapat terhubung kedalam satu *database* nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 KTP saja. Menurut UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Definisi dari EKTP atau kartu tanda penduduk elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat system keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada *database* kependudukan nasional. Penduduk hanya di perbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas

4 tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, surat Izin mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Dengan adanya E-KTP ini tentunya masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan Negara melalui tertutupnya peluang adanya

KTP ganda atau KTP palsu dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris, TKI illegal dan perdagangan manusia sering menggunakan KTP ganda atau KTP palsu tersebut untuk memalsukan identitas diri agar tidak teridentifikasi oleh pihak berwajib. Jumlah KTP palsu yang sangat besar tersebut dapat dipastikan bahwa dengan menggunakan KTP manual pemerintah sering mengalami kecolongan dalam mengawasi penggunaan KTP manual, karena KTP manual dapat di buat dengan mudah dimana saja, apalagi jika memiliki orang dalam disebuah instansi kecamatan. Dengan demikian masyarakat yang tidak bertanggungjawab dapat dengan leluasa melakukan kecurangan dan penyimpangan dengan menggunakan KTP manual.

- 5 Kartu Tanda Penduduk elektronik atau *electronic-KTP (e-KTP)* adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program *e-KTP* diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanaannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan
- 6 tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki *e-KTP*.

3.2 Kebijakan Penganggaran e-KTP

Penganggaran e-KTP dilakukan oleh Pemerintah oleh masing-masing daerah dengan sumber dana berasal dari APBD masing-masing daerah. Sementara itu, untuk pengadaan alat-alat elektronik yang berkaitan dengan perekaman dianggarkan oleh Pemeirntah Pusat melalui Kemendagri. Sedangkan, system penganggaran yang terjadi di Rokan Hulu terkait anggaran operasional e-KTP adalah sebagai berikut:

Tabell.3 Data anggaran e-KTP di Rokan Hulu

No	Nama Kecamatan	Anggaran Operasional e-KTP	Sumber Dana
1	Tambusai	Rp 14.000.000	Dana operasional e-KTP berasal dari APBD masing-masing daerah. Sedangkan untuk sarana seperti alat perekaman dan pencetakan
2	Tambusai Utara	Rp. 14.000.000	
3	Tandun	Rp. 14.000.000	
4	Kabun	Rp. 14.000.000	
5	Rambah	Rp. 14.000.000	
6	Ujung Batu	Rp. 14.000.000	
7	Rambah Hilir	Rp. 14.000.000	

8	Kepenuhan	Rp. 14.000.000	adalah tanggung tanggungan Pemerintah Pusat
9	Kepenuhan Hulu	Rp. 14.000.000	
10	Bonai Darussalam	Rp. 14.000.000	
11	Kunto Darussalam	Rp. 14.000.000	
12	Rambah Samo	Rp. 14.000.000	
13	Pendlian IV Koto	Rp. 14.000.000	
14	Rokan IV Koto	Rp. 14.000.000	
15	Pagaran Tapah Darussalam	Rp. 14.000.000	
16	Bangun Purba	Rp. 14.000.000	
	Biaya lain-lain	Rp. 26.000.000	
	Jumlah	Rp. 250.000.000	

Sumber data: Disdukcapil Rokan Hulu tahun 2012

proses penganggaran e-KTP di Kabupaten Rokan Hulu untuk seluruh kecamatan yang ada bukan berdasarkan fungsi anggaran yang dikemukakan oleh I Made Leo dalam bagian teoritis pada bab I di atas. Proses penganggaran e-KTP di Rokan Hulu untuk seluruh kecamatan yang ada hanyalah berdasarkan prediksi serta waktu target yang telah ditetapkan. Pemerintah seharusnya dalam hal ini harus berinisiatif untuk solusi yang terjadi di lapangan nanti ketika waktu pelaksanaan. Contohnya di Kecamatan Tambusai sendiri salah satu hambatanya adalah listrik yang sering mati sementara penyediaan genset dari pemerintah tidak ada.

3.3 Pelaksanaan di Lapangan

1. Proses Pelaksanaan Perekaman e-KTP di Kecamatan Tambusai

Kecamatan Tambusai merupakan kecamatan kedua tertinggi pertumbuhan penduduknya setelah Tambusai Utara. Pertumbuhan penduduk tersebut lebih banyak di hasilkan dari banyaknya penduduk pendatang yang ingin menetap di Kecamatan Tambusai. Banyaknya penduduk pendatang membuat petugas pendataan RT dan Rw setempat dalam merekap data yang akan rekam e-KTP. Dalam pelaksanaan perekaman e-KTP di Kecamatan Tambusai dilaksanakan oleh UPTD dInas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu berkoordinasi dengan perangkat kecamatan dan pemerintah desa setempat. Perekaman di Kecamatan Tambusai berlangsung dari Juni 2012 hingga Agustus 2012. Dalam perekaman dibantu dengan satu unit perangkat perekaman dari Pemerintah Pusat. Sementara, untuk arus listrik di Kecamatan Tambusai mengandalkan PLN. Perekaman dilakukan di Kantor Camat Tambusai. Pelaksanaan perekaman data e-KTP di Kecamatan Tambusai berlangsung dari

bulan Juni sesuai dengan target perekaman serentak diseluruh kecamatan yang ada di Rohul. Perekaman e-KTP yang berlangsung di Kecamatan Tambusai hingga saat ini sudah melalui beberapa tahap sesuai target dari pemerintah.

2. Proses Pelaksanaan Perekaman e-KTP di Kecamatan Tambusai Utara

Sama halnya dengan Kecamatan Tambusai, proses pelaksanaan perekaman e-KTP di Kecamatan Tambusai Utara berlangsung dari bulan Juni dengan target penyelesaiannya akhir Juni juga. Proses perekaman e-KTP yang berlangsung di Kecamatan Tambusai Utara memang sedikit lambat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya hambatan yang terjadi.

Meskipun tergolong dalam kecamatan baru, Tambusai Utara merupakan Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi dibanding kecamatan lainnya yang ada di Rokan Hulu. Hal ini disebabkan oleh tingginya arus mobilisasi di Kecamatan Tambusai Utara. Factor utama yang menyebabkan tingginya arus mobilisasi tersebut adalah Tambusai Utara merupakan wilayah perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan daerahnya adalah daerah industry. Tingginya angka penduduk di Kecamatan Tambusai Utara tentunya akan membutuhkan proses yang lama dan upaya yang lebih dalam hal perekaman data e-KTP di Tambusai Utara. Perekaman e-KTP di Tambusai Utara dilakukan oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Rokan Hulu berkoordinasi dengan perangkat kecamatan setempat dan Pemerintah Desa yang ada di kecamatan.

3.4 Hambatan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan

1. Respon Masyarakat Terhadap Program e-KTP

Dalam keberhasilan melaksanakan suatu program tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya keikutsertaan masyarakat, dimana mereka adalah objek sekaligus subyek dari program itu sendiri. Dibuat untuk mereka dan akan dinikmati oleh mereka sendiri. Jika dalam hal pelaksanaannya mereka tidak ikut serta, maka program tersebut boleh dikatakan tidak berhasil. Untuk Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara yang termasuk dalam dua Kecamatan dengan prediket terendah dalam hal perekaman e-KTP di Rokan Hulu sepertinya terhambat beberapa masalah yang ada di lapangan, dimana salah satunya yaitu respon masyarakat yang kurang akan pentingnya program ini.

2. Sistem Perencanaan Penganggaran Operasional e-KTP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan satu factor yang mempengaruhi proses pelaksanaan perekaman e-KTP di dua kecamatan ini adalah system perencanaan penganggaran yang belum optimal sesuai dengan kondisi daerah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Camat Tambusai Utara bapak Gorneng bahwa “untuk masalah proses perencanaan penganggaran pihak kecamatan tidak terlibat. Akan tetapi, hanya diberikan perintah untuk ikut serta mensukseskan perekaman e-KTP di kecamatan masing-masing. Kalau saya sendiri melihat sejauh informasi yang saya ketahui untuk system penganggaran operasional e-KTP ini memang belum tepat. Kalau dikatakan 14 juta perkecamatan bisa jadi, tetapi keterbukaan soal itu tidak ada. Terlebih lagi disetiap kecamatan ada personel teknis dari Dukcapil. Jadi menurut saya system perencanaan anggaran untuk e-KTP ini memang masih kurang efektif”.

3. Sumber Daya Manusia dan Ketersediaan Sarana

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ketersediaan personel dengan jumlah yang disebutkan diatas menjadi suatu hambatan bagi terlaksananya perekaman e-KTP sesuai target. Ditambah lagi dengan listrik yang sering hidup mati di wilayah Rokan Hulu, hal ini membuat antrian masyarakat yang melakukan perekaman menjadi panjang dan menumpuk. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk Kecamatan Tambusai, “personel di masing-masing kecamatan itu empat orang. Dibantu dengan aparatur kecamatan juga desa. Namun, untuk tahap perekaman memang ini kami belum ada solusi untuk itu, sebab ini menyangkut ketersediaan sarana. Karena dari Pemerintah Pusat sendiri sarana untuk setiap kecamatan di Rokan Hulu hanya satu. Sebenarnya ini belum efektif dalam mencapai target yang telah ditetapkan tetapi kami berupaya semampu kami untuk mencapai target tersebut”.

4. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang penting dalam suatu pelaksanaan. Kebijakan atau perencanaan yang dibuat oleh pemerintah tentunya harus disosialisasikan kepada masyarakat dan instansi terkait agar dalam pelaksanaannya tercipta kerjasama yang baik dan mendapatkan hasil yang baik. Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Mungkin bahasa yang paling tepat dalam hal ini adalah sosialisasi dari kebijakan yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa komunikasi yang terjadi antara masyarakat yang melakukan perekaman dengan petugas tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan terdesak oleh target yang telah ditetapkan.

Komunikasi antar pelaksana dengan masyarakat dalam hal kebijakan pelaksanaan program nasional ini memang sangat penting. Menurut **Uchjana (1999)** komunikasi yang tercipta dalam organisasi yakni antara pimpinan dan bawahan terbagi atas:

1. Komunikasi Vertikal, yaitu komunikasi dari atas kebawah yakni komunikasi dari pimpinan ke bawahan dan dari bawahan ke pemimpin. Komunikasi ini sangat penting sekali karena terjadi timbal balik sehingga pimpinan dapat mengetahui laporan, tanggapan, gagasan atau saran dari pegawai bawahan sebagai petunjuk efektif atau tidaknya kebijaksanaan yang dijalankan.
2. Komunikasi horizontal adalah komunikasi secara mendatar yakni antara sesama anggota staf atau pegawai, pegawai tingkat menengah dengan tingkat menengah, pegawai tingkat menengah dengan pegawai rendah atau pegawai rendah dengan pegawai rendah pula.
3. Komunikasi diagonal yaitu komunikasi dalam organisasi antara seseorang dengan orang lain yang berbeda kedudukan dan bagian yang dipegang.

Mengacu pada konsep komunikasi yang dikemukakan oleh Uchjana diatas dan berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka pola komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan perekaman data e-KTP di Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara adalah pola komunikasi vertical. Artinya, tidak ada komunikasi dua arah yang terjadi antara pelaksana dengan masyarakat

3.5 Tindak Lanjut Pemerintah Dalam Menangani Masyarakat Yang Belum Melakukan Perekaman e-KTP di Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara

1. Koordinasi yang melibatkan RT dan RW Serta Pihak Terkait

Sistem kerja dalam mewujudkan keberhasilan sebuah program tentu merupakan hal yang penting. Hal ini juga dilakukan oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu melalui UPTD untuk Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara. Koordinasi antar pelaksana dari UPTD dengan aparat kecamatan, desa sampai pada tingkat RT dan RW setempat.

Hal ini sesuai dengan instruksi Wakil Bupati pada 8 Juni pada pelaksanaan evaluasi rekam e-KTP di Rpkn Hulu. Menurutnya, RT dan Rw adalah perangkat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan bisa merangkul masyarakatnya untuk melakukan perekaman secepatnya. Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah RT dan RW dalam hal pelaksanaan perekaman ini diberi tugas untuk mengumpulkan rekap data berupa kartu KK dan photo kopi KTP lama.

2. Pelayanan perekaman e-KTP dibuka hingga malam

Tidak tercapainya target pada akhir Juni 2012 membuat Bupati mengeluarkan instruksi kepada UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertugas di 16 kecamatan di Rokan Hulu bekerja melakukan perekaman e-KTP hingga malam. Hal ini dilakukan karena disinyalir banyak masyarakat yang beralasan kalau siang itu tidak sempat karena mereka bekerja. Alasan dibukanya perekaman hingga malan adalah untuk tercapainya target perekaman secara nasional dan alasan lainny adalah masyarakat yang tidak sempat melakukan perekaman pada siang hari karena terhambat masalah pekerjaan dapat melakukan perekaman di malam harinya.

3. Menerapkan sistem *door to door*

Selanjutnya solusi ketiga yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dalam mengejar perekaman e-KTP adalah menerapkan system *door to door*. Dimana mereka yang mendatangi masyarakat yang belum melakukan perekaman ke tempat kerja. Hal ini dilakukan merupakan bnetuk wujud pelayanan prima dari pemerintah terhadap masyarakat demi kepentingan masyarakat juga.

Ucapan Terima Kasih

Terselenggaranya penelitian ini tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Bantuan baik berupa moril maupun materiil.

1. Ucapan terima kasih kepada bapak Yusmar selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang telah banyak memberikan informasi dan data dalam kegiatan penelitian ini.
2. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada bapak Drs. Erman Muhtar, M.Si selaku pembimbing yang dengan sabar membimbing saya dalam penelitian ini. Terima kasih atas saran, pikiran dan waktu yang telah diberikan.

3. Ucapan terima kasih kepada Bapak Gorneng, S.Sos, M.Si selaku Camat Kecamatan Tambusai Utara dan bapak Sharial Lupi, S.Sos selaku Camat Tambusai, yang telah bersedia memberikan data dan saya wawancara.
4. Terima kasih kepada patugas UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara bapak Muslim dan bapak Anas, S.Pd, M.Pd

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi Winarno.2002.*Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Jakarta: Media Pressindo).
- Ernan Rustiadi, dkk. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Uchjana dalam Eddy Wibowo.2005. *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. Yogyakarta: BPEE. Dikutip dari Norman Husein 2012.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rustiadi, Ernan. Dkk. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Satori. Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah.2010. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah